

PERANCANGAN MODEL KONSEPTUAL TATA KELOLA E- GOVERNANCE DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL BERBASIS COBIT 2019

Oleh:

Royatuddin¹

Tata Sutabri²

Universitas Bina Darma

Alamat: JL. Jenderal Ahmad Yani No.3, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota
Palembang, Sumatera Selatan (30111).

Korespondensi Penulis: 201420096@student.binadarma.ac.id,
tata.sutabri@gmail.com.

Abstract. *This study aims to design a conceptual model of e-governance governance based on COBIT 2019 to support digital transformation in the public sector. The research is motivated by the need for structured, measurable, and strategically aligned IT governance to address challenges in e-governance implementation, including limited infrastructure, human resource competencies, and the absence of adequate control and evaluation mechanisms. A literature review method was employed to analyze concepts related to e-governance, IT governance, public sector digital transformation, as well as the components and domains of COBIT 2019. The resulting conceptual model consists of three main components: input, process, and output. The input component includes strategic policies, human resource competencies, IT infrastructure, and stakeholder needs. The process component is structured based on the governance and management elements of COBIT 2019, encompassing the EDM, APO, BAI, DSS, and MEA domains. Meanwhile, the output component represents the IT governance capability level used as an indicator of implementation maturity. This model is expected to serve as a conceptual reference for government institutions in designing more effective, structured, and sustainable e-governance governance.*

PERANCANGAN MODEL KONSEPTUAL TATA KELOLA E-GOVERNANCE DALAM Mendukung TRANSFORMASI DIGITAL BERBASIS COBIT 2019

Keywords: *E-Governance, Digital Transformation, IT Governance, COBIT 2019.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model konseptual tata kelola *e-governance* berbasis COBIT 2019 sebagai upaya mendukung transformasi digital pada sektor publik. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan akan tata kelola teknologi informasi yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan implementasi *e-governance*, seperti keterbatasan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, serta kurangnya mekanisme pengendalian dan evaluasi TI. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan menganalisis konsep *e-governance*, tata kelola TI, transformasi digital sektor publik, serta komponen dan domain dalam COBIT 2019. Hasilnya adalah model konseptual yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu *input*, proses, dan *output*. Komponen *input* mencakup kebijakan strategis, kompetensi SDM, infrastruktur TI, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Komponen proses dirancang berdasarkan struktur *governance* dan *management* COBIT 2019 yang meliputi fungsi EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Sementara itu, komponen *output* berupa tingkat kapabilitas tata kelola TI sebagai indikator kematangan implementasi. Model ini diharapkan dapat menjadi acuan konseptual bagi instansi pemerintah dalam merancang tata kelola *e-governance* yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *E-Governance, Transformasi Digital, Tata Kelola TI, COBIT 2019.*

LATAR BELAKANG

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi elemen strategis dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Melalui konsep *e-governance*, pemerintah berupaya membangun sistem administrasi dan pelayanan yang terintegrasi secara digital agar dapat diakses dengan lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. *E-governance* tidak hanya berfungsi sebagai sarana digitalisasi layanan, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan birokrasi yang mendorong tercapainya pemerintahan yang lebih adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Namun demikian, implementasi *e-governance* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala terkait kesiapan

infrastruktur, koordinasi antarinstansi, serta efektivitas tata kelola teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital secara menyeluruh.

Salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan *e-governance* adalah keberadaan tata kelola teknologi informasi yang terstruktur dan selaras dengan tujuan strategis pemerintahan. Tanpa tata kelola yang memadai, pengembangan sistem digital berpotensi berjalan secara parsial, tidak terarah, dan tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi peningkatan layanan publik. Ketiadaan mekanisme pengendalian, manajemen risiko, serta pengukuran kinerja yang konsisten dapat menyebabkan implementasi layanan digital menjadi tidak efektif dan sulit dievaluasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka kerja yang mampu memberikan panduan dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi tata kelola *e-governance* secara komprehensif agar transformasi digital dapat berlangsung secara terukur dan berkelanjutan.

COBIT 2019 merupakan kerangka tata kelola teknologi informasi yang dikembangkan untuk membantu organisasi, termasuk sektor publik, dalam memastikan bahwa pemanfaatan TI berjalan selaras dengan tujuan strategis serta memberikan nilai yang optimal. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada tujuan, COBIT 2019 menyediakan struktur tata kelola yang mencakup proses pengawasan, perencanaan, pengelolaan risiko, pengelolaan layanan, dan evaluasi kinerja TI. Kerangka ini dapat diterapkan untuk memperkuat tata kelola *e-governance*, terutama dalam memastikan konsistensi kontrol, akuntabilitas, serta efektivitas implementasi layanan digital di lingkungan pemerintahan. Namun demikian, penerapan COBIT 2019 dalam *e-governance* masih memerlukan model konseptual yang dapat memetakan keterkaitan antara domain tata kelola COBIT dan komponen utama penyelenggaraan layanan digital pemerintahan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk merancang model konseptual tata kelola *e-governance* berbasis COBIT 2019 yang dapat mendukung proses transformasi digital secara lebih terarah. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis literatur yang berkaitan dengan *e-governance*, tata kelola teknologi informasi, transformasi digital sektor publik, serta penerapan COBIT 2019 sebagai kerangka pengendalian dan pengelolaan TI. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan model tata kelola yang dapat menjadi acuan

PERANCANGAN MODEL KONSEPTUAL TATA KELOLA E-GOVERNANCE DALAM Mendukung TRANSFORMASI DIGITAL BERBASIS COBIT 2019

bagi instansi pemerintah dalam merancang strategi, pengendalian, dan peningkatan kualitas implementasi *e-governance* di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

E-Governance

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah yang biasanya disebut dengan *e-government* yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mencapai *good governance* (Febrika, 2025). *E-governance* tidak hanya dipahami sebagai digitalisasi prosedur birokrasi, tetapi sebagai suatu bentuk transformasi tata kelola yang mengubah hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya melalui penerapan teknologi sebagai *enabler* utama. Melalui *e-governance*, pemerintah diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih cepat, transparan, efektif, dan mudah dijangkau oleh masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Prihartono, 2023). Konsep ini mencakup beragam aspek, seperti penyediaan layanan daring, integrasi sistem informasi antarinstansi, pengelolaan data pemerintahan, serta penggunaan platform digital dalam pengambilan keputusan.

E-governance merupakan sebuah fokus studi sebab terkait erat dengan kualitas pelayanan publik kedepannya, yakni terkait dengan layanan yang lebih baik serta lebih efisien, kepemimpinan yang efektif, aktivitas dilakukan secara *mobile* (bergerak), serta perbaikan program pemerintah lewat berbagai inovasi (Irma et al., 2023). Dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, *e-governance* mencakup tiga dimensi utama: *government-to-citizen* (G2C), *government-to-business* (G2B), dan *government-to-government* (G2G). Ketiga dimensi tersebut menggambarkan bagaimana teknologi mendukung interaksi pemerintah dengan masyarakat, pelaku usaha, serta antarinstansi pemerintahan. Pada dimensi G2C, *e-governance* bertujuan meningkatkan aksesibilitas layanan publik, penyederhanaan proses administrasi, serta peningkatan kepuasan masyarakat melalui layanan yang responsif. Pada dimensi G2B, teknologi digunakan untuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan mendorong iklim usaha yang kompetitif. Sementara itu, pada dimensi G2G, *e-governance* berperan dalam menciptakan koordinasi dan integrasi antarinstansi agar penyelenggaraan layanan menjadi lebih konsisten dan efisien.

Keberhasilan implementasi *e-governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental. Pertama, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, meliputi jaringan komunikasi, platform aplikasi, serta sistem keamanan informasi yang mampu menjaga kerahasiaan dan integritas data. Oleh karenanya, kerangka dan prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam lingkup *governance* dikenal dengan *electronic governance (e-Governance)* atau *digital Governance* (Noviyanti et al., 2022). Kedua, kualitas sumber daya manusia, khususnya kompetensi aparatur dalam mengoperasikan dan mengembangkan layanan digital. Ketiga, kerangka kebijakan dan regulasi yang memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis digital. Selain itu, budaya organisasi, dukungan manajemen puncak, serta komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik juga menjadi faktor penentu efektivitas *e-governance*.

IT Governance

IT *Governance* adalah kerangka kerja yang memastikan bahwa investasi TI mendukung tujuan bisnis, memaksimalkan nilai, dan mengelola risiko dengan efektif (Apriadi & Muhammad, 2025). Dalam sektor publik, tata kelola TI memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan penyelenggaraan layanan digital pemerintah bergantung pada sejauh mana teknologi dapat diarahkan untuk menghasilkan nilai bagi masyarakat. IT *governance* pada bagian IT adalah bagian dari tata kelola instansi atau perusahaan (Syaputra, 2022). IT *governance* tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan sistem informasi, tetapi juga melibatkan mekanisme pengendalian, kebijakan, struktur organisasi, serta proses pengambilan keputusan yang memastikan bahwa investasi, risiko, dan sumber daya TI dikelola secara optimal. Dengan demikian, tata kelola TI berfungsi sebagai fondasi yang menghubungkan teknologi dengan pencapaian tujuan strategis penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam implementasinya, tata kelola TI pada instansi pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan operasional. Untuk melakukan implementasi IT *Governance* pada suatu instansi, terdapat beberapa *key success factor* implementasi IT *Governance* yaitu model operasi TI, *maturity assessment*, struktur organisasi dan program tata kelola, serta tools pendukung (Mahardika et al., 2023). Tanpa tata kelola TI yang

PERANCANGAN MODEL KONSEPTUAL TATA KELOLA E-GOVERNANCE DALAM Mendukung TRANSFORMASI Digital BERBASIS COBIT 2019

memadai, sistem informasi rentan mengalami ketidaksesuaian dengan kebutuhan organisasi (Wahyudi & Jibril, 2025)

Transformasi Digital Sektor Publik

Transformasi digital dalam sektor publik merupakan suatu proses perubahan fundamental yang melibatkan adopsi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, memperkuat kualitas layanan publik, serta mendorong terciptanya tata kelola yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Transformasi digital dalam sistem pemerintahan tidak hanya menuntut kesiapan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten dan regulasi yang mendukung keberlanjutan implementasinya (Kardiati et al., 2025)

Dalam sektor publik, transformasi digital memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintah. Melalui pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi terintegrasi, komputasi awan, big data, dan kecerdasan buatan, pemerintah dapat melakukan proses administrasi dengan lebih efisien dan memberikan layanan publik yang lebih proaktif dan personal. Transformasi digital juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena memungkinkan pemerintah membuka data publik, memperkuat mekanisme monitoring, dan mengurangi potensi penyimpangan dalam proses birokrasi. Dengan demikian, transformasi digital ialah proses perubahan mendasar, yang disebabkan oleh adanya penggunaan teknologi digital yang inovatif disertai dengan pengaruh strategis dari sumber daya dan kompetensi utama, guna meningkatkan nilai suatu entitas secara radikal (Luthfia & Ramadani, 2022)

Transformasi digital sudah menjadi keharusan strategis bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja layanan dan efisiensi. Transformasi digital dalam sektor publik diharapkan dapat memberikan nilai bagi pengguna, baik itu masyarakat maupun pemerintah (Suhermawan et al., 2023). Adapun keberhasilan transformasi digital di sektor publik ditentukan oleh sejumlah faktor kunci. Pertama, kesiapan organisasi, yang mencakup struktur, proses, dan budaya kerja yang mendukung perubahan. Sistem birokrasi yang kaku dan resistensi terhadap teknologi sering menjadi hambatan utama dalam proses transformasi. Kedua, kompetensi sumber daya manusia, terutama kemampuan aparatur dalam memahami dan mengelola teknologi digital serta kapasitas untuk beradaptasi dengan proses kerja baru. Ketiga, dukungan kebijakan dan regulasi,

yang memberikan landasan hukum bagi inovasi digital serta menjamin keamanan, privasi, dan perlindungan data. Keempat, ketersediaan infrastruktur teknologi yang stabil dan aman sebagai fondasi utama penyelenggaraan layanan digital. Selain itu, komitmen pimpinan dan kolaborasi antarinstansi juga memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan transformasi digital.

Framework COBIT 2019

COBIT 2019 merupakan kerangka kerja tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA sebagai pembaruan dari versi sebelumnya, dengan penekanan pada fleksibilitas, relevansi, dan keterukuran dalam penerapannya. *Framework* ini dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi selaras dengan tujuan strategis organisasi, memberikan nilai yang optimal, serta mampu mengelola risiko dan sumber daya secara efektif. COBIT 2019 adalah pembaruan dari COBIT sebelumnya, melengkapi pengaturan COBIT dengan tujuan agar selalu membantu asosiasi dalam mencapai tujuan bisnis mereka (Hummanur & Musyirifah, 2022). Pada versi terbaru ini COBIT 2019 memberikan terobosan yang belum ada pada versi sebelumnya yaitu dengan adanya faktor desain sehingga dapat menjadi lebih mudah dalam penyesuaian dengan perusahaan (Yolanda et al., 2023). Berbeda dari versi sebelumnya, COBIT 2019 menekankan konsep *governance system* yang memandang tata kelola sebagai satu kesatuan komponen yang saling berkaitan, mencakup proses, kebijakan, struktur organisasi, budaya, informasi, layanan, serta kompetensi sumber daya manusia sebagai faktor penentu keberhasilan tata kelola TI.

COBIT 2019 terdiri atas lima domain utama, yaitu *Evaluate, Direct and Monitor* (EDM), *Align, Plan and Organize* (APO), *Build, Acquire and Implement* (BAI), *Deliver, Service and Support* (DSS), serta *Monitor, Evaluate and Assess* (MEA). Masing-masing domain memiliki tujuan yang berbeda namun terintegrasi, mulai dari pengawasan strategis, perencanaan dan pengorganisasian, pengembangan solusi, pengelolaan layanan operasional, hingga evaluasi kinerja dan kepatuhan. Melalui struktur domain ini, COBIT 2019 memberikan panduan sistematis yang dapat digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi tata kelola TI secara komprehensif. Kemudian, dari proses tersebut dilakukan penilaian kapabilitas pada COBIT 2019 yang dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu Level 0 (*Incomplete*), Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Managed*),

PERANCANGAN MODEL KONSEPTUAL TATA KELOLA E-GOVERNANCE DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL BERBASIS COBIT 2019

Level 3 (*Defined*), Level 4 (*Quantitative*), dan Level 5 (*Optimising*) (Algiffary, et al., 2023).

Salah satu aspek penting dalam COBIT 2019 adalah mekanisme *Goals Cascade* yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pemangku kepentingan menjadi tujuan organisasi, tujuan TI, dan tujuan pengelolaan. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan TI dapat ditautkan secara langsung dengan target strategis yang ingin dicapai. Selain itu, dalam proses desain tata kelola COBIT 2019 terdapat 11 faktor desain, yaitu: strategi organisasi, tujuan organisasi, profil risiko, isu terkait TI, lanskap ancaman, persyaratan kepatuhan, peran TI, sumber model TI, model implementasi, strategi adopsi teknologi dan ukuran organisasi (Moryanda et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) sebagai metode utama untuk merancang model konseptual tata kelola e-Governance berbasis COBIT 2019. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian berfokus pada perumusan model teoritis, sehingga diperlukan analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk jurnal, buku, standar tata kelola TI, serta dokumen yang membahas implementasi dan prinsip-prinsip COBIT 2019. Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan menyeleksi sumber-sumber yang memiliki kredibilitas akademik tinggi dan keterkaitan langsung dengan topik *e-Governance*, tata kelola teknologi informasi, transformasi digital sektor publik, dan kerangka COBIT 2019.

Literatur yang terpilih dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsep-konsep inti, kesenjangan penelitian, serta hubungan antar variabel yang relevan dalam membangun model konseptual. Analisis dilakukan secara sistematis dengan memetakan temuan-temuan utama ke dalam komponen-komponen COBIT 2019. Hasil dari analisis literatur tersebut kemudian disintesis untuk menghasilkan model konseptual tata kelola e-Governance yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mendukung transformasi digital pada instansi pemerintahan. Model ini disusun berdasarkan integrasi teori dan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan tata kelola sektor publik serta karakteristik fleksibel yang ditawarkan oleh COBIT 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Rancangan Model Konseptual

Berdasarkan hasil penelaahan mendalam terhadap prinsip, komponen, serta struktur tujuan dalam COBIT 2019, dirumuskan sebuah model konseptual tata kelola *e-governance* yang menggambarkan keterkaitan antara faktor organisasi, proses tata kelola TI, dan tingkat kapabilitas yang ingin dicapai. Model ini berfungsi sebagai representasi teoretis mengenai bagaimana instansi pemerintah dapat mengelola teknologi informasi secara terstruktur, terukur, dan selaras dengan arah transformasi digital. Model ini disusun melalui tiga blok utama, yaitu *input*, proses, dan *output*.

Komponen *input* mencakup berbagai elemen fundamental yang menentukan kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan tata kelola berbasis COBIT 2019. Elemen pertama adalah kebijakan dan arahan strategis yang menjadi landasan formal bagi seluruh aktivitas TI, termasuk regulasi internal, standar operasional, serta rencana strategis digital pemerintah. Elemen kedua adalah kompetensi sumber daya manusia, terutama kemampuan teknis, manajerial, dan pemahaman pegawai terhadap prinsip *governance*. Elemen ketiga adalah kondisi dan kapasitas infrastruktur TI, mencakup jaringan, keamanan informasi, aplikasi inti, serta kesiapan sistem pendukung. Elemen keempat adalah kebutuhan pemangku kepentingan, baik masyarakat maupun unit layanan internal, yang menentukan prioritas pengembangan layanan digital. Keempat komponen ini tidak hanya menjadi *input* teknis, tetapi juga menjadi faktor determinan terhadap efektivitas implementasi domain-domain COBIT 2019.

Tahap proses dibentuk berdasarkan struktur tata kelola dalam COBIT 2019 yang memisahkan aktivitas *governance* dan *management*. Pada sisi *governance*, organisasi menjalankan fungsi evaluasi, pemberian arahan, dan pemantauan terhadap penggunaan teknologi informasi. Aktivitas ini memastikan bahwa seluruh keputusan TI berada dalam koridor tujuan strategis instansi dan mematuhi standar layanan publik. Pada sisi *management*, proses mencakup perencanaan dan pengorganisasian sumber daya (APO), pembangunan dan penerapan solusi teknologi (BAI), penyampaian layanan dan dukungan operasional (DSS), serta kegiatan pemantauan dan penilaian berkelanjutan (MEA). Proses-proses tersebut bekerja secara integratif: perencanaan yang baik mendasari keberhasilan implementasi, implementasi yang tepat memungkinkan layanan berjalan stabil, dan pemantauan berkelanjutan menyediakan umpan balik untuk perbaikan. Prinsip

PERANCANGAN MODEL KONSEPTUAL TATA KELOLA E-GOVERNANCE DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL BERBASIS COBIT 2019

governance system dan *governance components* dalam COBIT 2019 menjadi kerangka berpikir yang memastikan bahwa organisasi dapat mengelola risiko, mengoptimalkan sumber daya, serta mengarahkan TI secara berkesinambungan.

Output model konseptual berupa tingkat kapabilitas tata kelola TI yang merefleksikan sejauh mana organisasi mampu menerapkan proses-proses COBIT 2019 secara konsisten, terdokumentasi, dan terukur. Tingkat kapabilitas ini mencerminkan kualitas penerapan tata kelola, *from* proses yang masih *ad hoc* hingga proses yang sudah terkelola secara proaktif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Nilai kapabilitas ini sekaligus menggambarkan kesiapan organisasi dalam menghadapi tuntutan transformasi digital, terutama dalam penyediaan layanan publik yang transparan, responsif, dan efisien. Semakin tinggi tingkat kapabilitas yang dicapai, semakin besar potensi organisasi dalam mengendalikan risiko, memastikan ketersediaan layanan, serta menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas *e-governance*.

Pembahasan Model Konseptual

Model konseptual tata kelola *e-governance* berbasis COBIT 2019 yang telah dirancang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan teknologi informasi dalam sektor publik sangat dipengaruhi oleh kesiapan elemen input serta konsistensi proses tata kelola yang dijalankan. Pada tahap input, keempat komponen utama yaitu kebijakan strategis, kompetensi sumber daya manusia, kapasitas infrastruktur TI, dan kebutuhan pemangku kepentingan memiliki fungsi sebagai fondasi yang membentuk arah implementasi. Kebijakan dan regulasi menentukan batasan serta standar yang harus dipatuhi, sementara kompetensi SDM menentukan sejauh mana proses tata kelola dapat dijalankan secara disiplin dan profesional. Infrastruktur TI berperan memberikan dukungan teknis yang stabil bagi seluruh aktivitas digital, sedangkan kebutuhan pemangku kepentingan memastikan bahwa tata kelola TI tetap relevan dan berorientasi pada kualitas layanan publik. Dengan demikian, input dalam model ini tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga merupakan prasyarat strategis bagi keberhasilan proses tata kelola.

Tahap proses pada model konseptual mencerminkan struktur sistem tata kelola dalam COBIT 2019, di mana aktivitas *governance* dan *management* bekerja secara saling melengkapi. Fungsi *governance* yang mencakup evaluasi, arahan, dan pemantauan merupakan mekanisme pengendalian yang memastikan bahwa seluruh kebijakan dan

keputusan TI tetap berada dalam jalur tujuan organisasi. Sementara itu, fungsi *management* yang terbagi ke dalam domain APO, BAI, DSS, dan MEA berperan sebagai mekanisme operasional yang mengelola siklus hidup teknologi informasi. APO menghasilkan rencana strategis serta struktur pengorganisasian yang dibutuhkan, BAI memastikan pembangunan solusi berbasis analisis kebutuhan yang tepat, DSS menjaga stabilitas layanan TI sehari-hari, dan MEA mengukur efektivitas proses melalui evaluasi berkelanjutan. Hubungan antar-domain bersifat iteratif sehingga setiap hasil *monitoring* dalam domain MEA menjadi masukan bagi perencanaan strategis APO maupun arahan *governance*. Pola siklus ini menunjukkan bahwa tata kelola TI bukan sistem statis, melainkan sebuah rangkaian proses yang membutuhkan adaptasi terus-menerus terhadap kondisi organisasi dan perubahan kebutuhan digital.

Output dalam bentuk tingkat kapabilitas tata kelola TI memberikan gambaran sejauh mana organisasi mampu menjalankan proses COBIT 2019 secara konsisten, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi. Tingkat kapabilitas yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa organisasi memiliki mekanisme tata kelola yang stabil, mampu mengendalikan risiko secara sistematis, dan mampu mempertahankan kualitas layanan publik secara berkelanjutan. *Output* ini juga berfungsi sebagai indikator yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah dalam menentukan prioritas perbaikan, menyusun rencana strategis jangka panjang, serta mengevaluasi kematangan transformasi digital yang sedang berlangsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan sebuah model konseptual tata kelola *e-governance* berbasis COBIT 2019 yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara faktor organisasi, proses tata kelola TI, dan tingkat kapabilitas yang ingin dicapai dalam mendukung transformasi digital sektor publik. Model konseptual ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan TI dalam *e-governance* sangat bergantung pada kesiapan elemen *input*, yang meliputi kebijakan strategis, kompetensi sumber daya manusia, kapasitas infrastruktur TI, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Keempat elemen tersebut menjadi fondasi penting yang menentukan arah, konsistensi, dan keberlanjutan tata kelola teknologi informasi.

PERANCANGAN MODEL KONSEPTUAL TATA KELOLA E-GOVERNANCE DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL BERBASIS COBIT 2019

Proses tata kelola yang disusun berdasarkan struktur domain COBIT 2019 meliputi fungsi *governance* serta domain APO, BAI, DSS, dan MEA membentuk siklus manajemen TI yang integratif dan berkesinambungan. Proses ini memfasilitasi penyelarasan antara strategi organisasi dan implementasi teknologi informasi, memastikan stabilitas layanan digital, serta menyediakan mekanisme evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. *Output* berupa tingkat kapabilitas tata kelola TI menjadi indikator yang merepresentasikan kematangan organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip COBIT 2019, sekaligus menggambarkan kesiapan instansi dalam menghadapi tuntutan transformasi digital yang semakin kompleks. Dengan demikian, model konseptual yang dihasilkan memberikan kontribusi teoretis dalam memahami tata kelola *e-governance* sekaligus dapat dijadikan dasar bagi perancangan strategi implementasi pada lingkungan pemerintahan.

Saran

Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan validasi empiris terhadap model konseptual ini melalui studi kasus pada instansi pemerintah yang sedang atau telah mengimplementasikan *e-governance*. Validasi ini penting untuk memastikan bahwa hubungan antar-komponen dalam model dapat diobservasi secara konsisten di lapangan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan analisis dengan memasukkan variabel tambahan seperti budaya organisasi, tingkat adopsi digital oleh masyarakat, atau kebijakan keamanan informasi mengingat ketiganya memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi tata kelola TI. Instansi pemerintah juga disarankan untuk memanfaatkan model ini sebagai acuan dalam menyusun peta jalan (*roadmap*) tata kelola digital yang lebih terarah, sehingga setiap upaya transformasi digital dapat dijalankan secara terukur, berorientasi pada kebutuhan publik, dan mendukung peningkatan mutu layanan pemerintahan secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Algiffary, A., Herdiansyah, M. I., & Kunang, Y. N. (2023). Audit Keamanan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dengan Framework COBIT 2019 Pada RSUD Palembang BARI. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 19-26.

- Apriadi, F. N., & Muhammad, A. H. . (2025). Penerapan IT Strategic Alignment dan IT Governance untuk Mengukur Kematangan Helpdesk Layanan TI. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 1385-1403.
- Hammanur, H., P, I., & Musyirifah, M. . (2019). Mapping IT Governance Based on COBIT 2019 on the Enterprise System Architecture Smart Tourism PT. YoY Management International. *J-Icon : Jurnal Komputer Dan Informatika*, 65-71.
- Irma, N., Ginting, B., Agusmidah, A., & Leviza, J. . (2023). Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 454-466.
- Kardiati, D., Hafiz, A., Isma, Y. S., Chairunnisak, S., Fadhillah, S. K., & Akmal, F. . (2025). INTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK: STUDI EVALUASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH. *JOURNAL OF INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE*, 10-16.
- Luthfia, F., Mulyana, R., & Ramadani, L. (2022). Studi Kasus Pengaruh Tata Kelola Ti Terhadap Transformasi Digital Dan Kinerja Bank B. ZONasi. *Jurnal Sistem Informasi*, 100-116.
- Mahardika, A., Yaswi, D. S., Damayanti, K. F., & Alifathurrahman, M. S. (2023). Tingkat penerapan tata kelola teknologi informasi (IT governance) terhadap kualitas SDM berdasarkan model pengukuran COBIT: A systematic literature review. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 27-45.
- Moryanda, R., Pujani, V., & Marpaung, Y. (2024). Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Menggunakan Framework COBIT 2019 (Studi Kasus: Semen Padang Hospital). *J. Nas. Teknol. dan Sist. Inf*, 299-306.
- Noviyanti, D. T., Septiana, A. M., Larini, S., Sundanis, A. S., Kamaludin, F., Nugraha, H. F., ... & Laksana, B. B. . (2022). Analisis Sistem Informasi Desa dalam Mendorong Penerapan Digital Governance di Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
- Suhermawan, S. F. N., Mulyana, R., & Ramadani, L. (2023). Analisis Pengaruh Tata Kelola Ti Terhadap Transformasi Digital Dan Kinerja Kementerian A. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 370-380.

PERANCANGAN MODEL KONSEPTUAL TATA KELOLA E- GOVERNANCE DALAM Mendukung TRANSFORMASI DIGITAL BERBASIS COBIT 2019

- Syaputra, A. (2022). Penilaian IT Governance dalam Manajemen Risiko IT Menggunakan Metode Quantitative dan Qualitative Risk Analysis. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 83-73.
- Wahyudi, F., & Jibril, M. . (2025). AUDIT SISTEM INFORMASI TERHADAP IT GOVERNANCE DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN MODEL REFERENSI COBIT.
- Yolanda, S., Hendra, H., Hita, H., & Ginting, T. W. (2023). Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 2019 Domain BAI03 (Studi Kasus: PT. Berlian Tangguh Sejahtera). *Jurnal SIFO Mikroskil*, 173-186.